

## **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA**

**Yoga**

\*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan dan mengeksplorasi efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Punggur Kecil. (2) Mendeskripsikan dan mengeksplorasi pembangunan sosial ekonomi di Desa Punggur Kecil. (3) Membandingkan penilaian IDM berdasarkan kriteria pemerintah dengan persepsi masyarakat. (4) Membandingkan perbedaan kategori IDM berdasarkan kriteria pemerintah dengan persepsi masyarakat.

Sampel yang diambil sebanyak 50 KK yang terdiri dari 40 warga (tidak termasuk aparat desa dan tokoh

masyarakat) yang terdiri dari 20 KK yang bertempat tinggal di dusun terdekat dengan Kantor Desa dan 20 KK yang bertempat tinggal di dusun terjauh dari kantor desa. 10 lainnya merupakan tokoh masyarakat. penentuan sampel yaitu dengan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu Kuesioner. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan eksploratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan skala perhitungan, dengan angka 93,65% (dalam kisaran 90-100%) maka kategori tingkat efektifitas penggunaan APBDes Desa Punggur Kecil masuk dalam klaster efektif. (2) Pembangunan Sosial ekonomi di desa punggur kecil dominan berfokus pada pembangunan infrastruktur kesehatan dan infrastruktur aksesibilitas berupa pembangunan jalan namun lemah di pembangunan infrastruktur pendidikan. (3) Terdapat perbedaan penilaian Indeks Desa Membangun Desa Punggur Kecil dimana skor berdasarkan pemerintah lebih besar sebanyak 0,6356 yaitu sebesar 0,9783 dari pada berdasarkan persepsi masyarakat yang sebesar 0,7615. (4) Terdapat perbedaan kategori Indeks Desa Membangun Desa Punggur Kecil yaitu berada pada kategori sebagai desa maju berdasarkan persepsi masyarakat dan kategori mandiri berdasarkan persepsi pemerintah.

**Kata Kunci :** Anggaran Dana Desa, Realisasi Dana Desa, Indeks Desa Membangun

### **1. PENDAHULUAN**

Desa Punggur Kecil merupakan salah satu dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Desa Punggur Kecil disebut juga Desa Swadaya maksudnya adalah Desa yang memiliki lahan yang terdiri dari hamparan persawahan dan perkebunan, mereka menggunakan lahan tersebut untuk menanam padi, sayur-mayur, dan buah-buahan.

---

\*Email : Yogatripel17@gmail.com

Komoditas unggulan dari Desa Punggur Kecil adalah buah Langsat dan Durian yang terkenal, yang menjadikan profesi para pekerja di Desa Punggur Kecil sendiri sebagian besar adalah petani.

Untuk melihat besaran anggaran yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pemerintah Desa Punggur Kecil, dan program apa saja yang dibuat oleh aparatur Desa Punggur Kecil pada tahun 2018-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1. Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan pengeluaran untuk pembangunan di Desa punggur kecil meningkatkan setiap tahun. Biaya dan jumlah pembangunan yang terjadi juga meningkat di setiap tahunnya, pembangunan di tahun 2019 meningkat cukup besar dibanding tahun 2018. Hal ini dikarenakan faktor seperti kebutuhan masyarakat terus bertambah, pengembangan fasilitas penunjang desa, serta meningkatnya harga barang setiap tahun. Terlihat juga pada tabel tersebut bahwa setiap tahun realisasi dana desa lebih kecil dibandingkan dengan anggaran. Hal ini memperlihatkan bahwa masih terjadi surplus anggaran. Realisasi anggaran yang rendah belum tentu menandakan bahwa telah terjadi efektivitas dalam penyerapannya. APBDes yang efektif tentu akan memberi dampak positif bagi kebijakan pengeluaran anggaran tersebut dimana anggaran efektif akan menciptakan penempatan penggunaan modal pada saluran-saluran yang menguntungkan, dalam arti seimbang dengan program-program yang telah direncanakan dan tepat sasaran. Adanya anggaran yang efektif memberikan pengaruh bagi pembangunan yang merata dan penyerapan dana yang dianggarkan terealisasi dengan benar dan baik serta optimal.

Desa Punggur Kecil merupakan salah satu dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Adanya Dana Desa yang dibentuk oleh pemerintah merupakan suatu dorongan untuk melancarkan roda perekonomian masyarakat di Desa Punggur Kecil membantu kegiatan aktifitas mereka karena, Dana Desa yang didapat tersebut salah satunya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada di Desa Punggur Kecil yang merupakan hambatan yang di hadapi masyarakat tersebut

Biaya dan jumlah pembangunan ditahun 2019 meningkat cukup besar dibanding tahun 2018. Hal ini dikarenakan faktor seperti kebutuhan masyarakat terus bertambah, pengembangan fasilitas penunjang desa, serta meningkatnya harga barang setiap tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa masih terjadi surplus anggaran. Selain itu, pembangunan di desa tidak terlepas dari perbaikan kualitas dan kuantitas serta kondisi dan kebutuhan yang diperlukan desa tersebut dimana pembangunan di desa menjadi salah satu faktor untuk menilai status yang dimiliki suatu desa, hal ini dapat dilihat langsung dengan menggunakan keenam variabel (dimensi kesehatan, pendidikan, modal sosial, permukiman, ekonomi, dan ekologi) sehingga membentuk Indeks Desa Membangun (IDM). Desa yang memiliki nilai IDM tertinggi adalah Desa Sungai Kakap yaitu 0,9452. Lalu Desa Punggur Kecil yang menjadi lokasi penelitian ini menjadi desa dengan nilai IDM sebesar 0,8194 dibawah Desa Punggur Besar. Di Desa Punggur Kecil yang menjadi indikator tertinggi adalah Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yaitu 0,8914 sedangkan indikator terendah adalah Indeks Ketahanan Lingkungan (IKE) yaitu sebesar 0,7000.

Alasan penulis mengambil Desa Punggur Kecil sebagai objek penelitian yakni didasarkan pada beberapa pertimbangan. Desa Punggur Kecil dalam tatanan pemerintahan tergolong dalam desa mandiri yang kemungkinan besar pengaruh

kemajuan desa dalam hal ekonomi dan pendapatan masyarakat sejalan dengan program desa mandiri yang akan menaikkan taraf perekonomian maupun bidang lainnya. Ketiga, Desa Punggur Kecil termasuk satu diantara desa yang mendapatkan program pemerintah berupa anggaran dalam pengelolaan desa mandiri, dalam hal ini penulis ingin menemukan kesesuaian pendapatan dan pengeluaran desa, terkhusus pada program Indeks Desa Membangun (IDM).

Berdasarkan uraian pada latar belakang diketahui bahwa APBDes Desa Punggur Kecil dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan begitu juga dengan status IDM pada desa tersebut, tetapi pada kenyataannya setelah dilakukan observasi dilapangan desa tersebut masih belum layak di kategorikan sebagai desa mandiri, Hal ini dikarenakan terjadinya ketimpangan antara data dari pemerintah dengan kenyataan dilapangan seperti infrastruktur yang kurang memadai, serta tingkat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih belum merata. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan mengeksplorasi efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Punggur Kecil.
2. Mendeskripsikan dan mengeksplorasi pembangunan sosial ekonomi di Desa Punggur Kecil.
3. Membandingkan penilaian IDM berdasarkan kriteria pemerintah dengan persepsi masyarakat .
4. Membandingkan perbedaan kategori IDM berdasarkan kriteria pemerintah dengan persepsi masyarakat.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **2.1. Tinjauan Pustaka**

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Berikut ini merupakan beberapa pandangan tentang pembangunan atau teori pembangunan yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:

### 1. Teori *Trickle Down Effect* (Efek Penetasan Ke Bawah)

Menurut Todaro (2011: 17) teori ini menganggap bahwa pembangunan semata-mata sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan di suatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan GNI (*Gross National Income*), baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang diyakini akan menetes dengan sendirinya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lain, yang pada akhirnya menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata.

### 2. Teori Kapabilitas

Sen (Todaro, 2011: 22) mendefinisikan kapabilitas (*capability*) sebagai kebebasan yang dimiliki seseorang sesuai dengan karakteristik pribadi dan kendali mereka atas komoditas.

Pandangan ini juga menjelaskan bahwa pembangunan sangat menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan serta inklusi sosial dan pemberdayaan.

Penjelasan Permendes nomor 2 tahun 2016, memberikan kerangka pemikiran tentang pencapaian sasaran pembangunan Desa sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 -2019, penyusunan Indeks Desa Membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian Desa.

#### 2.2. Tinjauan Pustaka

Penelitian oleh Boedijono *et al* (2019) yang dimuat dalam Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB), volume 4 no. 1 hal. 9-20 dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. Metode analisis digunakann adalah Deskriptif, baik deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini cara pengambilansampel menggunakan cara teknik *purposive*. Sampel penelitian ini adalah desa-desa yang menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ada di tiga Kecamatan Kabupaten Bondowoso, yang meliputi Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tenggarang, dan Kecamatan Curahdami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya.

Penelitian oleh Suroso (2019) yang dimuat dalam Jurnal Litbang, Volume 15 No. 2 Hal. 77-90 dengan judul Eksistensi Pembangunan Masyarakat Dan Desa Di Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kuantitatif. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di Kecamatan Pati, Juwana, dan Tayu yang merupakan kecamatan yang memiliki kawasan perkotaan di Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi pembangunan desa di kecamatan yang memiliki kawasan perkotaan mengalami peningkatan IDM tetapi hanya sedikit desa yang mampu mengalami tranformasi tipologi setingkat lebih baik antara kurun waktu tahun 2017-2019. Secara umum pembangunan desa di Kecamatan Pati lebih membutuhkan pembangunan ekonomi (IKE), tetapi pembangunan desa di Kecamatan Juwana dan Tayu lebih membutuhkan pembangunan lingkungan (IKL). Relevan dengan kebijakan nasional, pembangunan desa agar bertitik tolak dari kondisi riil tipologi desa, potensi dan karakteristik lokal des

Penelitian oleh Yudistira, Endang & Bagoes (2019) yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Volume 5 No. 2 Hal. 1193-1200 dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana

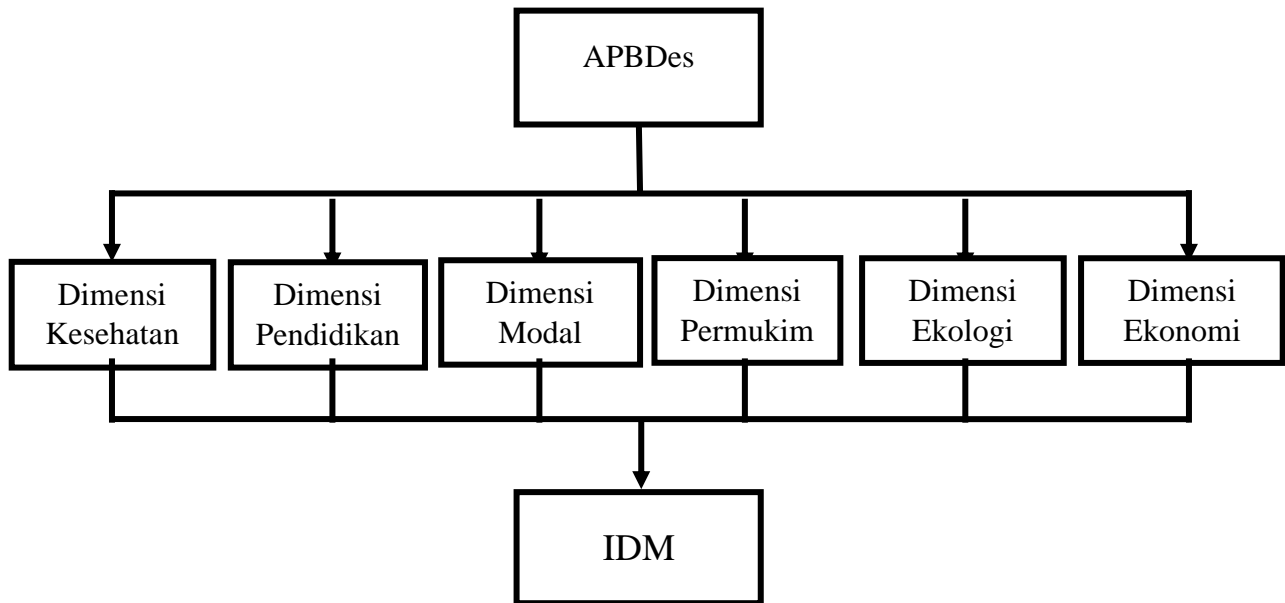
Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kuantitatif. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Ngimbangan ditinjau dari ketepatan melakukan perintah (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan) yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di Pemerintah Desa sudah berjalan dengan efektif.

Peneliti yang dilakukan oleh Sumianto (2018) yang dimuat dalam Jurnal Studi Kepemerintahan Volume 3 No. 2 Hal. 33-42 dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik di Desa Kampo-Kampo masih lambat diterapkan dengan cukup melihat realisasi pendapatan dan pengeluaran yang masih tersisa untuk mengusulkan rencana pembangunan yang lainnya.

Peneliti yang dilakukan oleh Saputra (2016) yang dimuat dalam Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume 6 No. 1 dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, *miss* komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.

### **2.3. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah di paparkan, peneliti telah memutuskan untuk menggunakan beberapa variabel terkait yang digunakan sebagai acuan dasar penelitian di Desa Punggur Kecil tersebut. Diawali variabel APBDes sebagai dasar yang mempengaruhi enam variabel lainnya yang diantaranya: (1) Dimensi Kesehatan, (2) Dimensi Pendidikan, (3) Dimensi Modal Sosial, (4) Dimensi Permukiman, (5) Dimensi Ekonomi, dan (6) Dimensi Ekologi sehingga keenam variabel ini akan membentuk variabel utama yaitu Indeks Desa Membangun. Selain itu terdapat variabel yang menjadi penghambat proses APBDes untuk membentuk IDM. Sehingga variabel tersebut membentuk kerangka dibawah ini :



**Gambar 2.1 Model Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambaran konseptual, dimulai dari APBDes yang berfungsi sebagai dasar proses berjalan dan berkembangnya keenam dimensi tersebut, serta mempengaruhi peningkatan kualitas tiap dimensi, sehingga keenam dimensi tersebutlah yang menjadi tolak ukur keberhasilan Indeks Desa Membangun di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

### 3. METODE PENELITIAN

penelitian ini merupakan deskriptif. Sugiyono (2016:89) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai bentuk penelitian yang tidak membandingkan variabel atau dengan kata lain penelitian ini berkenaan dengan satu variabel atau lebih secara mandiri. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 di bulan September-Oktober. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel populasi adalah keluarga yang berada di dusun terdekat dan dusun terjauh dari pusat desa (Kantor Kepala Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya). Responden terdiri dari 40 warga (tidak termasuk aparat desa dan tokoh masyarakat) yang terdiri dari 20 KK yang bertempat tinggal di dusun terdekat dengan Kantor Desa dan 20 KK yang bertempat tinggal di dusun terjauh dari kantor desa. 5 orang aparat desa. Aparat desa antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, DPSD dan Ketua RT/RW. 5 orang tokoh masyarakat (bukan aparat desa) antara lain tokoh agama, tokoh adat, dan Kepala Sekolah.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

#### **4.1.1 Karakteristik Responden**

Penelitian ini akan di lakukan di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2020 di bulan September-Oktober. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel populasi adalah keluarga yang berada di dusun terdekat dan dusun terjauh dari pusat desa (Kantor Kepala Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya). Responden terdiri dari 40 warga (tidak termasuk aparat desa dan tokoh masyarakat) yang terdiri dari 20 KK yang bertempat tinggal di dusun terdekat dengan Kantor Desa dan 20 KK yang bertempat tinggal di dusun terjauh dari kantor desa. 5 orang aparat desa. Aparat desa antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, DPSD dan Ketua RT/RW. 5 orang tokoh masyarakat (bukan aparat desa) antara lain tokoh agama, tokoh adat, dan Kepala Sekolah.

Berdasarkan data profil Desa Punggur Kecil menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Punggur Kecil kecamatan Sungai Kakap sampai dengan tahun 2017 berjumlah 12.235 orang dengan jumlah kepala keluarga (KK) 2.066 orang.

Tingkat pendidikan adalah lamanya seseorang menempuh pendidikan formal, yang dibedakan menjadi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi.

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Punggur Kecil Kabupaten Kubu Raya. Responden yang menjadi objek penelitian ini adalah 50 responden, melalui daftar pertanyaan di dapatkan kondisi responden tentang umur, jenis kelamin, Status pernikahan, Tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan akurat mengenai gambaran responden yang digunakan sebagai objek penelitian.

APBDes merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pengalokasian bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan hal itu pemerintah daerah harus lebih menekankan peranan dan fungsi masing-masing terutama fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Konsep Efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Setelah dilakukan tabulasi, berikut adalah penyajian hasil pengolahan data dari keseluruhan responden penelitian :

##### **a. Indeks Ketahanan Sosial**

Ketahanan sosial merupakan unsur pertama dari penilaian Indeks Desa Membangun. Bisa dikatakan lebih dari sekedar jumlah orang atau individu karena terlibat dalam setiap kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, ketahanan sosial merupakan suatu kesanggupan atau kemampuan dalam menghadapi perkembangan yang bergerak secara dinamis. Ketahanan sosial menurut IDM memiliki beberapa dimensi penilaian, yakni kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan permukiman.

#### b. Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Desa Membangun kedua yang jadi penilaian yakni ketahanan Ekonomi, ekonomi menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan perekonomian di desa dan pengembangan desa atau wilayah. Pembangunan tidak hanya soal ekonomi saja, dalam pengertian lain pembangunan harus mencakup masalah materi dan finansial dalam kehidupan manusia.

#### c. Indeks Ketahanan Ekologi

Ekologi dapat dikatakan sebagai interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ketahanan adalah kekuatan atau daya tahan. Sehingga penulis menyimpulkan ketahanan ekologi ialah daya tahan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ketahanan ekologi memiliki subindikator yaitu kualitas lingkungan, dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana.

#### d. Indeks Desa Membangun (IDM)

Berikut adalah perhitungan Indeks Desa Membangun dari data keseluruhan responden :

$$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$$

$$IDM = \frac{0,827+0,749+0,773}{3}$$

$$IDM = 0,783$$

### 5.1.2.Selisih Penilaian Indeks Pembangunan Desa

#### 1. Dimensi Kesehatan

Penilaian antara responden dengan peneliti terhadap pelayanan kesehatan menunjukkan terdapat perbedaan, rata- rata warga memberi nilai 3 (cukup) dan pemerintah memberikan nilai 3,6 cukup (Tabel 4.17). Terdapat perbedaan untuk manfaat keikutsertaan dalam BPJS antara nilai rata- rata responden sebesar 4 dengan peneliti dengan memberikan nilai 5 atau baik berdasarkan wawancara kepada seketaris desa yang dimana sebagian besar warga sudah terdaftar sebagai peserta BPJS (Tabel 4.18). terdapat perbedaan Penilaian terhadap aktivitas posyandu anatara responden dengan peneliti dimana sudah baik karena aktivitas masing- masing posyandu setiap dusun dilakukan sekali dalam sebulan namun sebagian besar warga kurang puas dengan kegiatan yang hanya 1 kali sebulan, karena ada sebagian warga yang ketinggalan dan tidak bisa hadir pada hari yang ditentukan. (Tabel 4.19).

#### 2. Dimensi Pendidikan

Responden maupun peneliti sama-sama memberikan penilaian 3 atau cukup baik untuk jarak yang ditempuh ke SD dan SMP. Akses ke prasarana pendidikan juga kurang baik karena kondisi jalan yang belum seluruhnya dibangun (Tabel 4.20). terdapat perbedaan nilai responden dengan peneliti untuk kegiatan PAUD, Paket A, B, dan C, serta kursus keterampilan cukup baik. Warga menilai tidak baik untuk pendidikan untuk PAUD karena hanya tersedia satu fasilitas di desa, sedangkan untuk Paket A, B, dan C kurangnya informasi untuk melaksanakan ujian paket tersebut dan biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Kursus keterampilan dirasa warga kurang, karena tidak ada kursus keterampilan (Tabel 4.21). Perbedaan rata- rata nilai responden dengan peneliti pada akses ke perpustakaan desa adalah 1 (Tabel 4.22). Sebagian besar warga desa tidak tahu tentang adanya perpustakaan desa.



### **3. Dimensi Modal Sosial**

Nilai rata-rata responden dengan peneliti pada dimensi modal sosial memiliki sedikit perbedaan. Gotong royong di desa telah dilaksanakan lebih dari 1 kali dalam sebulan. Tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara responden dan peneliti pada keberadaan ruang publik terbuka yang tidak berbayar, ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga dan kelompok kegiatan olahraga masing-masing dengan nilai 3 atau cukup. Warga merasa tidak banyak yang dibangun dalam hal sarana olahraga (Tabel 4.23). Nilai rata-rata antara responden dan peneliti terhadap toleransi adalah sama, yaitu 4 atau baik. Warga desa sangat menjunjung tinggi nilai toleransi baik antar agama, bahasa, dan suku, seperti saat hari besar tiap masing-masing agama. Peneliti menilai sangat baik berdasarkan kriteria pemerintah yaitu keragaman agama, bahasa, dan suku (Tabel 4.24). Nilai rata-rata responden dan peneliti terhadap rasa aman terdapat sedikit perbedaan. Responden merasa aman dengan partisipasi warga dalam Siskamling yang dilakukan di setiap dusun. Sementara dusun kalimas sangat sedikit atau hampir mendekati tidak ada terjadinya konflik (Tabel 4.25). Nilai rata-rata responden dan peneliti terhadap kesejahteraan sosial memiliki perbedaan 1 seisi, karena meskipun tidak ada anak jalanan, PSK, dan pengemis, tetap harus dilakukan pengawasan dan pencegahan. (Tabel 4.26). Sekolah Luar Biasa (SLB) berada di pusat Kabupaten, tidak di desa.

### **4. Dimensi Permukiman**

Penilaian antara responden dengan peneliti terhadap akses listrik adalah sama, yaitu baik, karena sebagian besar warga sudah menggunakan listrik dan pelayanan yang baik dari PLN (Tabel 4.26). Rata-rata nilai terhadap akses informasi dan komunikasi antara responden dan peneliti hanya terdapat sedikit perbedaan. Rata-rata warga merasa sinyal dan internet di luar kantor kurang baik dan kurang lancar untuk diakses sementara hampir seluruh warga sudah memiliki televisi. Warga tidak pernah menggunakan fasilitas internet di kantor desa, tetapi warga merasa baik dengan adanya internet di kantor desa. Tidak ada perbedaan penilaian antara responden dan peneliti terhadap akses ke sanitasi, karena sebagian besar warga telah memiliki jamban pribadi dengan septic tank, dan membakar sampah di tempat pembuangan sampah yang sudah dibangun. Peneliti menilai berdasarkan kriteria pemerintah untuk warga yang telah memiliki jamban pribadi dengan septic tank (sangat baik) dan membakar sampah (baik) (Tabel 4.27). Penilaian terhadap akses air bersih dan air minum layak antara responden dengan peneliti juga tidak ada perbedaan, karena sebagian besar warga menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci serta air untuk dikonsumsi menggunakan air hujan (Tabel 4.23).

### **5. Dimensi Ekonomi**

Nilai rata-rata responden dan peneliti terhadap keragaman produksi masyarakat desa tidak terdapat perbedaan. Sebagian besar warga merasa cukup baik dengan industri mikro di desa karena sudah mempermudah akses bagi warga untuk memenuhi kebutuhan hidup (Tabel 4.30). Penilaian terhadap akses ke pusat pelayanan perdagangan antara responden dengan peneliti terdapat perbedaan.

Sebagian besar warga merasa sangat mudah akses ke pusat pelayanan perdagangan seperti pertokoan, pasar, warung kelontong, kedai makanan dan penginapan karena jarak empuk yang cukup jauh meskipun kondisi jalan sudah aspal tetapi tidak terdapat transportasi umum.

Terdapat perbedaan penilaian terhadap akses distribusi/ logistik antara responden dan peneliti, karena sebagian besar warga merasa kurang puas dengan pelayanan dari pihak tersebut. Peneliti menilai berdasarkan kriteria pemerintah, jika ada lebih dari 1 kantor pos dan jasa logistik berarti sangat baik (Tabel 4.32).

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Efektifitas APBDes**

Berdasarkan hasil analisis, anggaran dana desa yang diterima dari pemerintah daerah melalui APBDesa telah sesuai dengan apa yang ditargetkan. Maka dari itu, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 berada pada tingkat efektivitas 96,3%. Hal ini sesuai dengan standar efektivitas menurut keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.600-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan yang menyatakan bahwa, apabila tingkat efektivitas atau hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa (ADD) mencapai angka 90% -100%, maka dapat dikatakan dalam kategori efektif. Dan dengan pencapaian tingkat efektivitas tersebut dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan dari alokasi dana desa di Desa Dawan Klod. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga.

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memberi pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Manfaat analisis efektivitas pengelolaan Dana Desa bagi masyarakat adalah sebagai tolak ukur tentang penyediaan pelayanan yang disediakan oleh aparatur Desa tersebut. Penyediaan layanan diantaranya seperti pelayanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta pelatihan ketenagakerjaan yang disediakan. Menurut data di atas Dana Desa dengan kategori efektif dapat menjelaskan jika pelayanan yang disediakan, dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

Kategori efektif masih dapat berubah setiap tahunnya, selama Anggaran Dana Desa masih berjalan. Tujuan adanya Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan warga Desa, maka dibuatlah program-program untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa. Program Dana Desa mayoritas adalah pembangunan infrastruktur, sehingga dampak dari program tersebut adalah mempermudah masyarakat dalam hal mobilitas kegiatan ekonomi dan warga menerima upah dari pembangunan infrastruktur tersebut, karena semua kegiatan Dana Desa harus melibatkan warga Desa.

### **4.2.2 Indeks Desa Membangun**

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus IDM maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa indeks desa membangun desa punggur kecil berada pada kategori sebagai desa maju berdasarkan persepsi masyarakat dan berada pada kategori mandiri berdasarkan kategori pemerintah. Dimana skor berdasarkan pemerintah lebih besar sebanyak 0,6356 yaitu sebesar 0,9783 dari pada berdasarkan persepsi masyarakat yang sebesar 0,7615.

Perbedaan yang signifikan adalah pada kualitas lingkungan, potensi rawan bencana dan tanggap bencana. Penilaian pada indeks ketahanan lingkungan di Desa punggur kecil menggambarkan terjadinya ketidak sesuaian atau kesenjangan antara apa yang dilihat maupun dirasakan masyarakat dan peneliti dilapangan berbeda dengan kategori yang di berikan pemerintah.

Di Desa Punggur Kecil pencemaran hanya terjadi pada udara dan sungai. Dimana pencemaran udara di Desa Punggur Kecil disebabkan oleh pembakaran sampah asap kendaraan pribadi masyarakat setempat maupun masyarakat luar yang melintasi wilayah tersebut sementara pencemaran sungai dikarenakan pengolahan limbah masyarakat yang dilakukan dengan cara membuangnya di sungai tersebut. Sedangkan potensi terjadinya bencana di Desa Punggur Kecil sangat kecil. Adapun bencana yang terjadi hanyalah banjir kecil dikarenakan musim hujan yang terjadi secara terus menerus dan dalam intensitas hujan yang lebat.

Pengolahan limbah yang salah dalam menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan berpotensi menyebabkan terjadinya bencana lama. Sesuai dengan Wahyudi, (2019) yang mengatakan bahwa pengolahan limbah dengan cara membakar dan membuangnya ke sungai dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga kesehatan.

Adapun menurut Widjajadalam (Soimin, 2019) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Selain itu, perbedaan signifikan juga terjadi pada bidang pendidikan dimana infrastruktur berupa tempat membaca juga masih minim di desa punggur kecil. Mayoritas penduduk yang merupakan lulusan SD dan banyak yang tidak tamat SD membuat budaya literasi kurang diperhatikan. Padahal sebenarnya, budaya literasi merupakan salah satu indikator utama dalam pembangunan indeks sumberdaya manusia. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pemerintah desa punggur kecil memiliki fokus utama terhadap pembangunan infrastruktur dan kurang memperhatikan fondasi pembangunan sumber daya manusia yaitu melalui peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan literasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”. Penelitian yang dilakukan oleh Kusharjanto & Kim (2011) menyebutkan bahwa ketersediaan infrastruktur pendidikan mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia yang digambarkan oleh IPM sebesar 0,03 persen. Lebih luas, peningkatan ketersediaan infrastruktur pendidikan tersebut mendorong meningkatnya dimensi pendidikan yang di dalamnya terdapat beberapa faktor lainnya seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan tingkat literasi di suatu wilayah. Hasil penelitian yang ada menunjukkan hasil yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini jumlah infrastruktur pendidikan dibedakan berdasarkan penyelenggaranya, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sekolah negeri secara signifikan mampu memengaruhi IPM namun nilai koefisien tersebut bernilai negatif dengan nilai - 0,0005744. Artinya, penambahan jumlah sekolah negeri dalam suatu wilayah justru untuk saat ini akan menurunkan IPM sebesar 0,0005744 persen IPM, ceteris paribus.

## **5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

1. Berdasarkan skala perhitungan, dengan angka 93,65% (dalam kisaran 90-100%) maka kategori tingkat efektifitas penggunaan APBDes Desa Punggur Kecil masuk dalam klaster efektif.
2. Pembangunan Sosial ekonomi di desa punggur kecil dominan berfokus pada pembangunan infrastruktur kesehatan dan infrastruktur aksesibilitas berupa pembangunan jalan namun lemah di pembangunan infrastruktur pendidikan.
3. Terdapat perbedaan penilaian Indeks Desa Membangun Desa Punggur Kecil dimana skor berdasarkan pemerintah lebih besar sebanyak 0,6356 yaitu sebesar 0,9783 dari pada berdasarkan persepsi masyarakat yang sebesar 0,7615.
4. Terdapat perbedaan kategori Indeks Desa Membangun Desa Punggur Kecil yaitu berada pada kategori sebagai desa maju berdasarkan persepsi masyarakat dan kategori mandiri berdasarkan persepsi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mendapatkan data bahwa efektifitas penggunaan dana APBDes di Desa Punggur Kecil sudah masuk dalam kategori efektif dan pembangunan yang sangat terasa adalah di bidang infrastruktur kesehatan, aksesibilitas dan pembangunan materil berupa jalan dan fasislitas layanan kesehatan, namun masih terdapat kesenjangan pendapat mengenai Indeks Desa Membangun yang sangat signifikan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan kordinasi dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok desa agar tidak terjadi selisih persepsi antara masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, diperlukan upaya evaluasi kembali mengenai kategori indeks desa membangun di Desa Punggur Kecil Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini penulis merasa masih banyak terdapat kekurangan, dan diharapkan dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitha, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bawono, I. R & Mochamad, N. (2012). *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD*. Jakarta: Salemba Empat.
- Beni, P. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*. Jakarta Pusat : Taushia.
- Boedijono *et al.* (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, 4(1) 9-20. Retrieved on 04<sup>th</sup> July 2020.
- Ghozi, S. (2015). *Statistik Deskriptif untuk Ekonomi*. Yogyakarta : Deepublish.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : STIM.
- Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 6(1). Retrieved on 04<sup>th</sup> July 2020.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka baru press.
- Sumianto, L. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(2) 33-42. Retrieved on 04<sup>th</sup> July 2020.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Suroso. (2019). Eksistensi Pembangunan Masyarakat Dan Desa Di Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang*, 15(2) 77-90. Retrieved on 04<sup>th</sup> July 2020.
- Todaro, M. P & Stephen C. S. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Yudistira, A, Endang, I & Bagoes, S. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Penelitian Admir Publik*, 5(2) 1193-1200. Retrieved on 04<sup>th</sup> July 2020.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

Kementerian Desa. (2016). Peraturan Menteri Desa No 2 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Indonesia: Kemendes.